

BAB V

Modernisasi sebagai jembatan hadirnya Gerakan *Saudi Women Digital Activism* dan Inisiasi VISI 2030 Arab Saudi sebagai upaya dalam meningkatkan ketesediaan akses pendidikan perempuan.

Sebelum tahun 1925, hanya ada empat sekolah swasta yang ada di Arab Saudi. Pendidikan umum mulai hadir di Arab Saudi pada tahun 1930-an. Raja Ibn Saud mulai melembagakan pendidikan program yang dirancang untuk mengamati ajaran Islam, menyebarkan pengetahuan, dan membangun sekolah. Pada tahun 1930-an, sekolah dasar negeri dan swasta pertama didirikan. Pada tahun 1935 sekolah menengah pertama mulai dibangun dibangun, Kemudian pada tahun 1930-an, seorang Jenderal Direktorat Pendidikan dilembagakan dan sekolah tingkat tersier diikuti pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pendidikan menjadi wajib bagi enam tahun. Pada tahun 1961, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Perempuan dibentuk dan kemudian pada 1960-an pendidikan Saudi dikembangkan untuk memungkinkan 50 persen dari siswa dapat melanjutkan ke pendidikan menengah dan tinggi. (Paquette, 2001)

Pada tahun 2001, ada 11.506 sekolah dasar di Arab Saudi, dan wajib enam tahun sekolah formal. Tingkat partisipasi perempuan menurun dengan tingkat pendidikan, dengan 75 persen terdaftar di sekolah dasar, 54 persen di sekolah menengah, dan hanya 15 persen terdaftar di pendidikan tinggi. (Paquette, 2001)

Arab Saudi dikenal dengan masyarakat yang sangat didominasi laki-laki dalam beberapa aspek sosial sehingga hal ini yang menciptakan banyak hambatan sosial bagi perempuan dalam peran kepemimpinan (Alexander, 2011), Seperti aturan mengenai perempuan yang hanya boleh bersekolah dengan izin ayah mereka atau suami mereka (Somers & Chris, 1998). Sampai pada tahun 2002, pendidikan laki-laki diawasi oleh Departemen Pendidikan Saudi, sedangkan pendidikan perempuan dikendalikan oleh Departemen Bimbingan Agama. Tujuan pemisahan ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan tidak menyimpang dari tujuan awal pendidikan perempuan, yaitu menjadikan perempuan sebagai istri dan ibu yang baik dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang diharapkan seperti mengajar dan menyusui yang diyakini sesuai dengan fitrahnya (Hamdan 44).

Fenomena lain di Arab Saudi yang secara tegas membatasi akses perempuan terhadap kualitas pendidikan adalah ketidaksetaraan pendidikan yang dapat diakses oleh perempuan Saudi dengan pendidikan laki-laki, sehingga menciptakan hambatan bagi pendidikan yang berkualitas. Ini terlihat dalam kenyataan bahwa ketika memilih jurusan perguruan tinggi, perempuan tidak diperkenankan memilih jurusan arsitektur, teknik, atau farmakologi (Somers & Chris, 1998). Pemisahan ini dilakukan sebagai upaya menjauhkan wanita dari karier yang tidak cocok untuk mereka.

Kendala utama yang dihadapi perempuan Saudi adalah peran yang diharapkan akan mereka mainkan di dalam masyarakat yakni, mereka diharapkan menjadi anak perempuan, istri, dan ibu yang taat, dan sebagian besar karir tidak terbuka untuk mereka. Sehingga pendidikan terlihat sebagai formalitas untuk dapat meningkatkan status sosial daripada kualifikasi untuk berkarir.

Bagi orang Saudi, pendidikan wanita lebih merupakan gelar yang dapat memberikan status sosial yang lebih tinggi melalui pernikahan. Ini mencerminkan di mana pendidikan tinggi bukanlah *"transisi untuk mendapatkan kesempatan karir dan pekerjaan yang diidamkan"* tetapi lebih sebagai status sosial untuk menikah. Ketika perempuan melanjutkan studi mereka ke sekolah menengah atau pendidikan tingkat tersier, mereka lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja tetapi lebih mungkin untuk menikah dengan laki-laki terpelajar yang memiliki pekerjaan untuk dapat menghidupi mereka berdua (Cadei, 2015)

Untuk kategori hambatan berikutnya, sebagai negara kesejahteraan tertinggi, Arab Saudi menyediakan beasiswa umum gratis untuk siswa (pria dan wanita) di beberapa bidang pendidikan umum dan di semua kejuruan, teknik, teknologi, dan pendidikan tinggi dengan transportasi gratis untuk semua wanita. (Hamdan, *Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements*, 2005). Namun, ada perbedaan antara sumber daya yang disediakan untuk perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, anggaran untuk pendidikan tinggi perempuan hanya 18% dari yang dialokasikan untuk pendidikan pria. Karena kebanyakan wanita di pendidikan tinggi tidak akan melanjutkan ke tenaga kerja, sumber daya yang dialokasikan untuk mereka sudah mulai mencerminkan kemungkinan peran mereka sebagai istri dan ibu. (Somers & Chris, 1998)

Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fasilitas perempuan lebih rendah, kelas yang kecil, dan akses ke sumber daya terbatas. Misalnya, wanita dapat menggunakan perpustakaan utama hanya satu hari dalam seminggu, sedangkan pria memiliki akses untuk mengunjungi selama 6 hari kedepannya. Pendidikan perempuan tidak memiliki status prioritas untuk pemerintah Saudi, sehingga tidak pula menjadi prioritas bagi universitas-universitas yang didanai negara. (Somers & Chris, 1998)

Adanya perbedaan sumber daya yang dialokasikan memperkuat peran sosial turut membatasi perempuan Saudi. Hal ini menghadirkan hambatan bagi akses perempuan ke pendidikan berkualitas. Karena perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, akses mereka secara inheren dibatasi. Dalam kasus perpustakaan yang telah dipaparkan, jelas bahwa kebijakan diskriminatif gender yang diberlakukan oleh universitas mencegah perempuan akses ke materi pendidikan; adanya anggaran yang terbatas, fasilitas kelas yang berbeda, dan pendidikan secara keseluruhan yang menjelaskan bahwa perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

5.1. Gerakan Saudi Women Digital Activism dalam menyuarkan aspirasi pendidikan di Arab Saudi: *Saudi Anti Male Guardianship Campaign*

Kebijakan untuk pendidikan anak perempuan di Arab Saudi menentukan jenis bidang yang tersedia untuk wanita Saudi di universitas. Pendidikan perempuan mengikuti kebijakan khusus gender. Dengan demikian, kursus perempuan dipusatkan pada pengajaran dan kesehatan. Namun, beberapa mata kuliah yang didominasi oleh mahasiswa laki-laki belakangan ini tersedia bagi mahasiswa perempuan seperti teknik, studi media dan hukum. Ada dua aspek konstruksi gender di Arab Saudi. Aspek-aspek tersebut saling tumpang tindih dan bersinggungan. Pertama, sistem patriarki, yang mengambil bentuk berbeda dalam membentuk dan mereproduksi peran dan relasi gender. Di bawah kondisi sistem patriarki, laki-laki dan perempuan dianggap berasal dari peran-peran tertentu. Wanita Saudi secara sosial diharapkan menjadi ibu dan ibu rumah tangga, sementara pria Saudi diharapkan menjadi pencari nafkah. Perwalian atau *Male Guardianship* adalah salah satu aspek dari sistem patriarki yang membatasi

mobilitas bagi pendidikan, dan pekerjaan perempuan Saudi. Wanita Saudi tidak dapat belajar, bepergian atau bekerja tanpa izin dari ayah, saudara laki-laki atau suami mereka. Aspek kedua dari konstruksi gender adalah tradisi dan adat-istiadat sosial. Beberapa tradisi kesukuan membatasi akses perempuan pada bidang atau profesi tertentu. Segregasi gender berkontribusi untuk mengarahkan laki-laki dan perempuan ke mata pelajaran atau profesi tertentu. (Jalwednani, 2016)

Adanya ketimpangan gender dan budaya patriarki yang terjadi di Arab Saudi, membuat sekelompok perempuan di Arab Saudi membentuk suatu gerakan pada awal 2015, yakni sebuah kampanye yang dinamakan *Saudi Anti Male Guardianship Campaign*, dengan maksud agar pemerintah Arab Saudi menyudahi kebijakan yang membatasi perempuan untuk bermobilisasi dan membuat keputusan. Terutama kebijakan perihal sistem perwalian atau *male guardianship* yang dinilai mencegah perempuan untuk melakukan sesuatu tanpa izin terlebih dahulu kepada wali, kerabat pria dan muhrimnya. (Tonnessen, *Women's Activism in Saudi Arabia: Male Guardianship and Sexual Violence*, 2016)

Saudi Anti Male Guardianship Campaign juga diserukan oleh para perempuan di Arab Saudi dengan mengedarkan petisi online di Twitter lewat tagar #IAmMyOwnGuardian dan mengadakan lokakarya untuk mendidik perempuan tentang undang-undang perwalian. Kampanye ini juga turut menyorot hak atas akses pendidikan yang terbatas bagi perempuan. (Alsahi, 2018). Terutama sistem perwalian laki-laki di Arab Saudi yang membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan karena anak perempuan tidak dapat dididik tanpa persetujuan wali laki-lakinya. Wali laki-laki memiliki wewenang untuk mencegah anak perempuan melanjutkan studi mereka di semua tingkatan, termasuk studi sarjana dan pasca sarjana. Selain itu, diperlukan izin dari wali laki-laki dalam memilih bidang studi.

Sistem perwalian laki-laki juga memberlakukan pembatasan pada perempuan yang berada di lembaga pendidikan karena mereka sering tidak diperbolehkan meninggalkan tempat bahkan dalam kasus sakit tanpa wali laki-laki. Faktanya, perempuan Saudi melaporkan bahwa di banyak lembaga pendidikan, guru dan siswa perempuan dikurung selama jam mengajar dan siswa tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kecuali wali laki-laki atau sopir yang ditunjuk datang untuk menjemput mereka. Sulitnya persyaratan pendampingan

wali laki-laki, menjadikan hanya sekitar 21% siswa perempuan Saudi yang berkesempatan belajar di luar negeri.

Dalam hal ini, adanya kampanye aktivisme *Saudi Anti Male Guardianship* dan tagar #IamMyOwnGuardian yang mulai diserukan oleh partisipasi perempuan Arab Saudi pada akhir tahun 2016, bermaksud ingin mendesak dan memastikan bahwa pemerintah Arab Saudi memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memberikan hak yang sama bagi pria dan wanita terutama memberikan akses pendidikan yang setara di semua tingkat akademik, sumber daya dan fasilitas yang sama. (Alsahi, 2018).

Selaras dengan penelitian dari literature sebelumnya, dalam mengkaji dinamika komunikasi online selama kampanye hak-hak perempuan Saudi untuk mengakhiri perwalian laki-laki, yang berlangsung di Twitter, Einar Thorsen dan Chindu Sreedharan dalam jurnalnya yang berjudul “*#EndMaleGuardianship: Women’s rights, social media and the Arab public sphere.*” juga telah menganalisis 2,7 juta tweet dengan tagar #EndMaleGuardianship untuk memeriksa sejauh mana sosial media Twitter dapat membentuk dan memfasilitasi komunikasi lintas gender, dan bagaimana hal ini membantu melahirkan ruang baru bagi publik untuk mengekspresikan perbedaan pendapat. Menurut peneliti Twitter dapat menyediakan ruang publik online yang sangat komunikatif. Anonimitas dalam Twitter menawarkan perempuan tempat yang aman untuk membahas keprihatinan mereka tentang perwalian laki-laki. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa sosial media seperti Twitter dapat di pertimbangkan dalam menciptakan semacam ruang kontra publik, yang membantu Perempuan Saudi melegitimasi kampanye #EndMaleGuardianship.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa dalam konteks Arab Saudi, Kampanye #EndMaleGuardianship di Twitter telah melahirkan ruang online alternative di mana perempuan dan laki-laki terlibat dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini berbanding terbalik dengan ruang publik tradisional di Arab Saudi yang dikenal memiliki norma budaya dan politik yang mengisolasi perempuan dari partisipasi politik seperti proses pengambilan keputusan, sehingga hadirnya sosial media Twitter sebagai ruang online ini memberikan perempuan kesempatan untuk memperdebatkan hal-hal yang penting secara publik. Meskipun begitu tetap

saja dalam beberapa interaksi yang peneliti identifikasi di Twitter tetap tercermin kesenjangan kekuasaan tradisional, dengan laki-laki yang berusaha untuk menegaskan dominasi mereka atas wanita. Pria yang mentweet pesan agresif dan mengejek terhadap perempuan menunjukkan bahwa mereka masih menolak perempuan yang membela hak-hak nya dan menuntut kesetaraan gender di sosial media.

Perlu dicatat bahwa kampanye #EndMaleGuardianship berlanjut selama luar biasa panjang dan merupakan faktor yang berpotensi signifikan dalam mempengaruhi dikeluarkannya dekrit kerajaan pada Mei 2017, yang juga bertepatan dengan Arab Saudi dalam pemilihan Komisi PBB tentang Status Perempuan untuk 2018-2022. Selain itu kampanye yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan seperti Women2drive dinilai bahkan lebih sukses, karena Raja Salman pada September 2017 mengumumkan penghapusan larangan terhadap wanita Saudi mengemudi secara mandiri. (Thorsen & Sreedharan, 2019).

Penulis mengungkapkan dalam kampanye perempuan Saudi melawan sistem perwalian pria, perempuan Saudi terlibat dalam aktivisme yang menggambarkan pertempuran untuk mendorong perubahan sosial dalam masyarakat patriarki Arab Saudi. Para perempuan diberdayakan oleh komunikasi dan jaringan yang disediakan oleh ruang media sosial, di manasuaranya wanita yang diredam dan ditekan bisa terdengar.

Konsisten dengan literatur pemberdayaan perempuan sebelumnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Amal Ibrahim pada tahun 2018 dalam penelitiannya *"#TogetherToEndMaleGuardianship: Saudi women's social media activism against the male guardianship system"*, Peneliti menganalisis mengenai aktivis perempuan Saudi yang menggunakan Twitter untuk memobilisasi perempuan Saudi lainnya untuk menjadi peserta aktif dalam masyarakat mereka daripada tetap menjadi subjek yang tidak berdaya. Aktivis menuntut agar perempuan melestarikan rasa pemberdayaan dan terus berjuang untuk lebih banyak hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sejalan dengan temuan sebelumnya tentang peran media sosial dalam pemberdayaan, peneliti berpendapat bahwa media sosial telah memungkinkan perempuan Saudi untuk menemukan potensi tersembunyi mereka, meningkatkan kekuatan, meningkatkan kemampuan untuk bertindak

bersama dalam memberdayakan wanita lain, dan menemukan solusi untuk masalah sosial mereka yang serius.

Menyelidiki peran media sosial dalam advokasi memberikan pedoman untuk advokat yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan menuntut perubahan sosial dan keadilan. Twitter telah digunakan oleh perempuan Saudi sebagai ruang publik virtual alternatif untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial yang masih belum tersentuh dan dianggap tabu di platform media konvensional. Twitter memungkinkan wanita Saudi untuk memperluas jangkauan kampanye mereka dan memberikan peluang jaringan yang terjangkau yang membantu mereka membawa perhatian dan menuntut perubahan pada kesulitan mereka. Ketangguhan dan kreativitas tercermin dalam kampanye perempuan Saudi melawan undang-undang perwalian seksis. Kampanye media sosial mereka melibatkan anggota masyarakat dalam percakapan tentang hak-hak perempuan dan diskriminasi. Aktivistis Saudi menggunakan beberapa strategi inovatif untuk mendekati masyarakat Saudi dan mendorong partisipasi dan keterlibatan budaya dalam masyarakat yang konservatif. Aktivistis menggunakan Twitter untuk menginspirasi ide dan menyerukan upaya kolektif untuk mendukung tuntutan perempuan Saudi yang telah diabaikan atau dibungkam dalam waktu yang lama.

Perempuan Saudi dapat memperluas advokasi virtual mereka dan menjembatani ruang aktivisme online dan offline. Ruang kampanye menentang sistem perwalian sering digunakan sebagai titik awal dari banyak upaya advokasi lainnya di jalan-jalan dan ruang publik Saudi. Platform media merupakan platform yang aman dan bebas berekspresi, di mana mereka yang terpinggirkan dan yang tertindas dapat tanpa rasa takut dan percaya diri berbicara dan berbagi cerita mereka. Peneliti berpendapat bahwa media sosial menawarkan sarana alternatif untuk ekspresi diri dan memberi perempuan banyak kesempatan untuk memulai dan berpartisipasi dalam dialog mengenai beberapa masalah mereka yang dulunya tabu dalam saluran komunikasi tradisional. (Ibrahim, 2018).

Dalam penelitian mengenai kebijakan reformis Arab Saudi, Penulis beranggapan bahwa munculnya kampanye yang diserukan melalui sosial media seperti Facebook, YouTube dan Twitter, untuk menyuarakan aspirasi terkait hak-

hak perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam menyebarkan pesan para aktivis hak-hak perempuan ke seluruh dunia.

Media dinilai sangat membantu untuk memobilisasi dan mempengaruhi dunia internasional. Hal ini sangat berpengaruh bagi Pemerintah Arab Saudi karena stabilitas negara nya berada dibawah tekanan aktivis hak-hak perempuan dan dunia internasional yang terus memprotes kebijakan Arab Saudi yang dinilai mengekang perempuan untuk menentukan nasib nya sendiri. Maraknya demonstrasi langsung, dan berbagai kampanye, termasuk kampanye *Women2Drive* yang menentang larangan mengemudi oleh perempuan di Arab Saudi, mejadikan pemerintah Arab Saudi mulai melunak dan mengizinkan perempuan mengemudi dan mengeluarkan SIM. Langkah ini dianggap sebagai kemajuan besar terhadap hak-hak perempuan di dalam kehidupan masyarakat Saudi yang cenderung konservatif. (Rizal & Khoirina, 2019).

Pada 2 Agustus 2019 Arab Saudi mengeluarkan Keputusan Kerajaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial wanita di Kerajaan. Perubahan ini oleh beberapa media dan kelompok perempuan disebut sebagai 'terobosan' yang membahas esensi kode hukum mengenai sistem perwalian laki-laki. Sistem ini adalah kode hukum yang dipengaruhi oleh interpretasi fundamentalis hukum Syariah dan telah lama dikritik baik oleh perempuan Saudi sendiri, organisasi internasional (misalnya PBB) dan kelompok hak asasi manusia, berpendapat sistem tersebut membatasi hak-hak dasar perempuan untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka sendiri. Akibatnya sistem melembagakan bahwa perempuan dewasa diperlakukan sebagai anak di bawah umur.

Lebih jauh lagi, sebuah praktik telah berkembang selama bertahun-tahun, di mana semua urusan dengan pemerintah atau kotamadya (misalnya melamar pekerjaan atau mencari pendidikan) juga menuntut agar perempuan didampingi oleh wali mereka. Keputusan Kerajaan baru-baru ini mengizinkan setiap warga negara untuk mengajukan paspor dan menyatakan bahwa siapa pun yang berusia di atas 21 tahun tidak memerlukan izin untuk bepergian. Selain itu, dekrit tersebut memberi perempuan dewasa kendali lebih besar atas urusan keluarga. Mereka sekarang diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahan, perceraian atau kelahiran

anak, dan mendapatkan dokumen resmi keluarga, yang harus dimiliki ketika mengajukan kartu identitas nasional dan mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah.

5.2. Peran Raja Salman dan Putra Mahkota dalam mengkaji kebijakan terhadap akses pendidikan perempuan pada tahun 2016-2020

Kemajuan sistem kebijakan pemerintahan di Arab Saudi tidak luput atas peran seorang pemimpin nya yang reformis. Pada tahun 2015, Arab Saudi resmi mengangkat Salman bin Abdul Aziz sebagai Raja Arab Saudi. Kemudian diangkatnya putra mahkota pada tahun 2017 yakni Putra kandung Salman, Mohammed bin Salman (MbS), yang menggantikan Muhammad bin Nayef sebagai putra mahkota sebelumnya. Sebagai seorang putra mahkota, Mohammed bin Salman memainkan peran utama setelah raja dan menjadi tokoh sentral dalam pengambilan keputusan Saudi dengan meluncurkan perubahan kebijakan yang ambisius.

Raja Salman memiliki berbagai kebijakan, salah satunya adalah mengubah kebijakan ekonomi kerajaan dengan mengajukan konsep Visi 2030. Adanya gagasan Visi 2030 dimulai dengan reformasi ekonomi sebagai langkah konkrit untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan gas. Visi Saudi 2030 adalah kerangka kerja Kerajaan Arab Saudi, yang disahkan oleh Pangeran Mohammed bin Salman, Wakil Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Salman. Gagasan reformasi yang dicanangkan oleh Mohammed bin Salman (MbS) dapat dilihat sebagai wujud kepedulian kerajaan terhadap sektor ekonominya, dengan minyak dan gas sebagai komoditas utama yang menopang kerajaan. (Hibatul, 2018)

Pemerintahan monarki mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Arab Saudi dan merupakan tantangan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik (Raphaeli, 2003). Meskipun demikian, dalam memutuskan kebijakan, Raja bukanlah satu satunya yang memiliki pengaruh seratus persen. Hak perumusan politik luar negeri tidak hanya dimiliki oleh raja, tetapi juga memerlukan pemberdayaan para menteri untuk berperan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Pada *Basic Laws of Governance Saudi Arabia* Pasal 57(b) menjelaskan bahwa ialah tugas Wakil Perdana Menteri dan para

Dewan Menteri untuk menyatakan kesatuan di hadapan Raja dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Dengan demikian, raja bukan satu-satunya subjek yang memiliki peran penuh dalam membentuk kebijakan luar negeri di Arab Saudi.

Hal ini juga terjadi pada Mohammed bin Salman yang hendak menyusun kebijakan dalam dan luar negeri sebagai bentuk perubahan arah Arab Saudi. Salah satu rancangannya adalah merumuskan kebijakan melalui konsep Visi 2030, yang mementingkan perubahan dan diversifikasi ekonomi. Visinya adalah meningkatkan potensi Arab Saudi yang dapat dicapai untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas, dengan target pendanaan sebesar \$500 miliar. (Haryadi, 2018)

Menyusul implementasi kebijakan Visi 2030, MbS juga memperkenalkan visi tersebut sebagai bagian dari Program Identitas Nasional Saudi berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Terpilihnya MBS sebagai Putra Mahkota membawa pada proses transisi dan reformasi terpenting di kawasan Timur Tengah Arab Saudi. Beberapa kebijakannya menjadi bentuk baru reformasi sosial, memberikan citra Arab Saudi yang lebih modern, contoh kebijakannya antara lain membuka bioskop, mengizinkan perempuan mengemudi dan meluncurkan kampanye antikorupsi. Selain itu, Arab Saudi lebih terbuka dan aktif secara budaya di kancha internasional melalui akses terbuka atau hubungan diplomatik budaya dengan negara lain.

Visi Saudi 2030 memiliki 3 pilar utama, yaitu masyarakat yang dinamis (*A Vibrant Society*), ekonomi yang makmur (*Thriving Economy*), dan negara yang ambisius (*An Ambition Nation*). Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada *A Vibrant Society* yakni Masyarakat yang dinamis. Hal ini memiliki makna bahwa Arab Saudi ingin memperkuat sumber daya manusianya didasarkan pada kenyataan bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekayaan yang sebenarnya dimiliki suatu negara dalam sumber daya manusia. Sejak Muhammad bin Salman menjadi mahkota raja, banyak sekali kebijakan yang memiliki perubahan secara signifikan, terutama terkait dengan hak-hak pendidikan perempuan. Termasuk adanya sistem perwalian laki-laki atau *male guardian* yang tidak lagi diperlukan sebagai syarat bagi perempuan untuk mendaftar sekolah atau perguruan tinggi. Selain itu perempuan diberikan

kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas diluar rumah dan menduduki posisi-posisi strategis baik dalam lembaga informal maupun formal.

Beberapa regulasi keberpihakan terhadap perempuan yang mulai muncul di Arab Saudi merupakan salah satu strategi pemerintah Saudi untuk dapat memenuhi target pada visi 2030. Tentunya ada beberapa pilar utama yang digagas Arab Saudi dalam memenuhi target visi 2030, yakni di bidang ekonomi dan sosial terutama kebijakan pro perempuan di bidang pendidikan.

5.3. Visi 2030 Arab Saudi: faktor hadirnya kebijakan reformis mengenai pendidikan perempuan Saudi

Visi Saudi 2030 merupakan rencana untuk mengurangi Ketergantungan Arab Saudi pada minyak, dan mencoba peluang keuntungan melalui ekonomi dan pengembangan sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pariwisata). Visi yang diumumkan pada tahun 2016 Ini juga akan mempromosikan pendirian negara pada program kesetaraan gender dan mencapai Visi 2030 Kerajaan. Salah satu langkah utama untuk mencapai tujuan ini adalah memberdayakan Wanita Saudi yang merupakan 50 persen dari populasi untuk berpartisipasi dan menyumbangkan keterampilan dan bakat yang mereka butuhkan ke pasar tenaga kerja Saudi.

Hadirnya Visi 2030 Arab Saudi melahirkan beberapa kebijakan baru terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Pembangunan di Arab Saudi memiliki perempuan dengan berbagai peluang di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, partisipasi dalam politik dan ketenagakerjaan (Parveen, 2021). Pada September 2017, sebuah keputusan dikeluarkan untuk mengizinkan perempuan mengemudikan mobil selama era Raja Salman bin Abdulaziz (Ojediran & Anderson, 2020). Hal ini merupakan salah satu langkah paling kritis yang diambil pemerintah Kerajaan untuk mendorong perempuan berpartisipasi lebih efektif dalam masyarakat. Larangan mengemudi merupakan hambatan besar bagi pekerjaan perempuan (Rajkhan S. , 2014) dan mengurangi keterlibatan di pasar tenaga kerja. Kebijakan ini diikuti sebulan kemudian dengan pengumuman lain bahwa perempuan juga akan diizinkan untuk menonton olahraga langsung di tiga nasional utama stadion, di Riyadh, Jeddah, dan Dammam (BBC News, 2017).

Kebijakan lain muncul pada tahun 2019, yakni H.H. Putri Reema Binti Bandar Al Saud diangkat sebagai duta besar untuk Amerika Serikat, menjadikannya wanita Saudi pertama yang pernah memegang posisi diplomatik ini.

Dengan tren yang berkembang dan transformasi global, perempuan di Arab Saudi dianggap diberdayakan dalam pendidikan dan hak-hak fundamental lainnya. Terlebih mengenai pendidikan, jurusan seperti hukum, teknik dan arsitektur telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang disediakan untuk perempuan di Kerajaan Arab Saudi (Al-shakha, 2019). Hal ini disebabkan oleh tindakan dan rencana pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk belajar dan mendidik dengan membuka sekolah bagi mereka dan juga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi.

Pemberdayaan perempuan di Arab Saudi telah dimulai pra-visi 2030. Dengan berdirinya Kerajaan oleh Raja Abdulaziz Al Saud hingga era saat ini. Dimulai dengan membuka sekolah untuk anak perempuan, menciptakan peluang pendidikan tinggi, dan menghasilkan serta membentuk inisiatif yang efektif, terutama pada masa pemerintahan Raja Abdullah dan Raja Salman. Banyak keputusan telah dikeluarkan untuk kepentingan perempuan, memberi mereka lebih banyak kesempatan. Beberapa bidang telah ditambahkan untuk pekerjaan perempuan. Salah satu upaya dan inisiatif yang nyata adalah pengangkatan Wakil Menteri Pendidikan, Norah Binti Abdullah Al Faiz, dari 2009 hingga 2015. Jabatan tersebut merupakan posisi tertinggi yang dicapai oleh seorang wanita Saudi. Jabatan lain juga adalah direktur universitas Putri Noura binti Abdul Rahman (Rajkhan S. , 2014).

Salah satu aspek paling kritis dari pendidikan bagi perempuan yang mewakili kepentingan pemerintah Saudi terhadap perempuan adalah Universitas Putri Nourah untuk Anak Perempuan. Hal ni adalah contoh paling menonjol yang didirikan pada tahun 2006 oleh dekrit kerajaan. Universitas tersebut dibentuk dari enam perguruan tinggi yang ada di Riyadh. Saat ini, universitas menampung sejumlah besar mahasiswi hingga 27888 dengan 121 program akademik yang disediakan pada tahun 2021.

Kebijakan tersebut berlawanan dengan situasi di masa lalu. Saat ini perempuan memiliki lebih banyak kebebasan dengan semua dukungan pemerintah

yang luar biasa untuk mendorong dan memberdayakan perempuan di segala bidang dalam berkontribusi menjadi anggota aktif dalam proses pembangunan negara. (Alhazmi & Kamarudin, 2021). Terlepas dari dampak tak terbantahkan pada perubahan kehidupan perempuan Saudi, sangat sedikit orang yang mengenali bahwa hal ini telah dimulai jauh lebih awal, dengan reformasi bertahap di pendidikan wanita. Perubahan ini mendahului visi yang lebih komprehensif untuk masa depan yaitu Visi 2030. Untuk lebih memahami garis waktu, perlu untuk mengidentifikasi perbedaan tahapan pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Saudi serta untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan dan reformasi yang berkontribusi pada pemberdayaan ini sejak lahirnya negara Saudi sampai sekarang.

Menelusuri upaya yang dilakukan pemerintah Saudi dalam pendidikan wanita dari tahun 1926 hingga 2019. Tabel 1 memberikan gambaran tentang kebijakan penting yang mempengaruhi pendidikan perempuan dan peran mereka dalam kehidupan sosial ekonomi Kerajaan selama hampir satu abad, pada tahun 1924–2019.

Tabel 1. Timeline Kebijakan Pemerintah Raja Arab Saudi Mengenai Pendidikan Perempuan (1926 – 2019)

Ruler	Year	Policy
King Abdul Aziz	1926	Became King of Hijaz and Sultan of Najd and its Dependencies; Directorate of Education established.
King Abdul Aziz	1928	Majlis al-Maarif (Council of Knowledge).
King Abdul Aziz	1936	Approved the establishment of a preparatory institute that prepared students to pursue a university degree abroad.
Crown Prince Faisal and H.H. 'Iffat Al Thunayan	1943	Established the Taif Model School for Boys in 1943 and for Girls in 1953.
King Abdul Aziz and Crown Prince Faisal Bin Abdul Aziz	Early 1940s	Faisal, against all expectations, allowed Fatima Shakir to make history; first scholarship for women.
Crown Prince Faisal Bin Abdul Aziz	1954	Ministry of Education established.
Crown Prince Faisal and 'Iffat Al Thunayan	1955	Founded the Dar Al Hanan, the first private school for women in Saudi Arabia. ⁽¹³⁾
King Saud Bin Abdul Aziz	1957	Established King Saud University, the nation's first university.
King Saud Bin Abdul Aziz	1960	Decreed a general directorate for girl's schools.
King Saud Bin Abdul Aziz	1962	First official primary school for girls in Riyadh opened.
King Faisal Bin Abdul Aziz	1970s	Saudization (nationalization) of the labor force

Ruler	Year	Policy
King Faisal Bin Abdul Aziz	1970	First five-year development plan (1970–1975), Educational Policy directive created, and First college of education for women opened.
King Faisal Bin Abdul Aziz	1975	Ministry of Higher Education established.
King Faisal Foundation	1999	'Iffat College for Girls established.
King Abdullah Bin Abdul Aziz	2005	King Abdullah Scholarship Program (KASP) established.
King Abdullah Bin Abdul Aziz	2008	College of Education renamed Princess Noura University, which has become the largest women's university in the world.
King Abdullah Bin Abdul Aziz	2011	Nitaqat was introduced.
King Abdullah Bin Abdul Aziz	2013	Quota of 20% for women in the country's legislative branch, the Al-Shura Council, enacted.
King Abdullah Bin Abdul Aziz	2015	Empowerment of women in the legislative Municipal elections. ⁽¹⁴⁾
King Salman Bin Abdul Aziz	2016	Vision 2030 plan announced.
King Salman Bin Abdul Aziz	2017-2020	Establishment of Your Job First and Then Your Scholarship Program, the third phase of KASP.
King Salman Bin Abdul Aziz	2018	In July women were permitted to drive and to watch live sports events at the three main national stadiums in Riyadh, Jeddah, and Dammam for the first time.
King Salman Bin Abdul Aziz	2018	Launch of a scholarship program for elite university.
King Salman Bin Abdul Aziz	2019	Appointment of first female ambassador to United States, HRH Princess Reema Bint Bandar Al Saud.
King Salman Bin Abdul Aziz	2019	Issue, on August 20, 2019, of a royal decree to further empower Saudi women by ending travel restrictions and giving them the right to register a child's birth, a marriage, or a divorce; be issued official family documents; and be eligible to serve as a guardian to children who are minors.

Source: Kéchichian (2015); Saudi Arabia, Ministry of Education; Saudi Arabia, Ministry of Labor.

Tentunya kebijakan reformis di bidang pendidikan membawa lebih banyak kesempatan bagi perempuan yang tercermin dalam program pendidikan dan beasiswa. Pada 2017, undang-undang perwalian dilonggarkan sehingga perempuan dapat menempuh pendidikan tanpa harus berpaku terhadap perwalian laki-laki (Ahmed, 2020). Perempuan Saudi diizinkan untuk menyelesaikan studi mereka di luar negeri dalam program beasiswa Kementerian Pendidikan, yang berkontribusi untuk memfasilitasi anak perempuan untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi mereka dan akses ke studi pascasarjana. (Rajkhan, 2014).

Saat ini, masyarakat Saudi telah menyadari kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan, yang sejalan dengan Visi 2030, Kerajaan telah mengadopsi strategi dan kebijakan untuk memasukkan perempuan dalam kepemimpinan atau posisi tingkat atas di Kerajaan Sektor Publik atau Sektor Swasta, yang mencerminkan perspektif yang baik dari pemerintah terhadap perempuan dan menetapkan kebijakan (Al-Ahmadi, 2011).

Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Arab Saudi sejak 2015. Kebijakan yang dimaksud tidak terlepas dari Visi 2030 Arab Saudi itu

sendiri. Pertama, reformasi sistem pendidikan Arab Saudi yang mengarah kepada moderasi dan toleransi. Kurikulum baru tengah disusun dengan tujuan mendorong kebebasan berpikir dan toleransi di kalangan para siswa. Mata pelajaran yang diajarkan akan memungkinkan para siswa bisa menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam berbagai situasi. Pengembangan kurikulum memasukkan proyek-proyek pendidikan baru yang mencakup mata pelajaran seperti filsafat dan pemikiran kritis. Sebagai bagian dari pengembangan kurikulum baru untuk sekolah menengah, Kementerian Pendidikan sudah menyelenggarakan berbagai lokakarya di lebih dari 100 sekolah menengah di Saudi. Disamping itu, Pemerintah Arab Saudi ingin mempercepat pengembangan kurikulum baru yang bisa memfilter konten ujaran kebencian dan memasukkan konten-konten pendidikan yang lebih humanis dan moderat. (BBC.com)

Di bawah Visi 2030 tersebut, reformasi di bidang pendidikan dihadirkan sebagai sarana untuk melaksanakan reformasi ekonomi. Pemerintah di satu sisi berupaya untuk memperkenalkan konten modern kurikulum seperti sains, filsafat, musik dan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Cina yang akan membantu pemerintah kelak membangun ekonomi modern. (Al-Otaibi, 2020)

Pemerintah Saudi mulai melihat pendidikan menjadi pranata sosial yang berperan dalam mewujudkan pembangunan negara. Maka dari itu bagaimana pendidikan dapat merelevansikan orientasi konten kurikulumnya dengan kebutuhan untuk mengembangkan sosio-ekonomi masyarakat seperti negara maju baik dibidang industri, perusahaan, bisnis dan lain-lain. Mereka harus bekal human capitalnya. Dengan demikian human capital merupakan investasi yang perlu mereka pertahankan dan mereka tingkatkan. Manusia sebagai sumber daya untuk pembangunan disamping sumber daya alam tentunya, perlu mereka perkuat melalui pendidikan. Ada beberapa kebijakan yang akhirnya dirubah atau direformasi. Peran perempuan yang selama ini kurang tampak, kemudian diberi peran yang lebih baik. Dalam masyarakat Saudi perempuan perlu belajar untuk berhubungan satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain sebagai sumber pengetahuan. (Hamdan, Women and education in Saudi Arabia:Challenges and achievements, 2005)

Disamping itu, pendidikan yang selama ini kurang menetapkan pendidikan wajib, akhirnya Arab Saudi menetapkan pendidikan wajib 12 tahun. Sebelumnya tidak ada penetapan pendidikan wajib 12 tahun, karena adanya keresahan mereka mengingat sebagian masyarakat Arab Saudi yang nomadik (berpindah-pindah) sehingga banyak juga diantara mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan secara baik. Namun, belakangan seiring dengan tantangan-tantangan di atas, Pemerintah Arab Saudi akhirnya menetapkan pendidikan wajib 12 tahun dan menjamin seluruh biaya pendidikan tersebut.

Selanjutnya persoalan integrasi ilmu, belakangan ini kebijakan pemerintah Saudi berupaya untuk mengintegrasikan Ilmu Agama dengan Ilmu Sains-Teknologi dan Sosial-Humaniora. Integrasi ilmu ini menjadi sesuatu hal yang amat menonjol di Arab Saudi. Penguasaan terhadap sains-teknologi ini membuat Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengirimkan pelajar-mahasiswa mereka kuliah ke luar negeri. Kebijakan ini telah diinisiasi oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz dan meningkat pada masa Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Raja Abdullah juga mengirimkan tenaga pengajar (guru dan dosen) ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen.

Disamping itu, Pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan reformasi seluruh perguruan tinggi mereka dengan cara menyewa tenaga pengajar/dosen dari luar negeri, terutama dari Mesir, seperti Islamic University dari Madinah, dimana pada awal mulanya tenaga pengajarnya (dosen-dosen) mayoritas (98%) didatangkan/dikontrak dari Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir. Kemudian terjadi transfer ilmu yang membuat Arab Saudi berkembang sendiri, sehingga sekarang tenaga pengajar dari Al-Azhar tersisa kurang dari 40%. Lebih dari 15 peraih Nobel dari berbagai bidang disiplin ilmu didatangkan dan dikontrol secara khusus oleh universitas-universitas di Arab Saudi untuk transfer ilmu pengetahuan.

Arab Saudi menyadari bahwa pendidikan adalah jawaban dari semua untuk menghadapi perkembangan dunia ini, life skill sangat diperlukan. Jika kebijakan sebelumnya pendekatannya lebih kepada tenaga pengajar (dosen/guru) dengan menghire (menyewa) tenaga pengajar dari luar negeri, tetapi belakangan

kebijakan dari Pangeran Muhammad bin Salman lebih mengarah kepada reformasi institusi/lembaga dan sistem pendidikannya.

5.4. Tingkat persentase pendidikan perempuan di Arab Saudi

Pada dasarnya perempuan Saudi mulai mendapatkan pendidikan tinggi pada tahun 1970 tetapi kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan baru hadir secara progresif pada 15 tahun terakhir. Hal ini meningkat dengan pesat seiring dengan kesadaran perempuan Saudi akan pendidikan yang layak untuk dapat menopang hidup mereka dalam mendapatkan karir yang baik.

Terlepas dari peningkatan umum dalam kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi perempuan, baik di tingkat sekolah maupun pendidikan tinggi, sejumlah langkah khusus diambil untuk kemajuan pendidikan perempuan. Monarki Saudi mengambil inisiatif untuk meningkatkan peluang, mendorong partisipasi dan memberikan pendidikan yang bervariasi bagi perempuan.

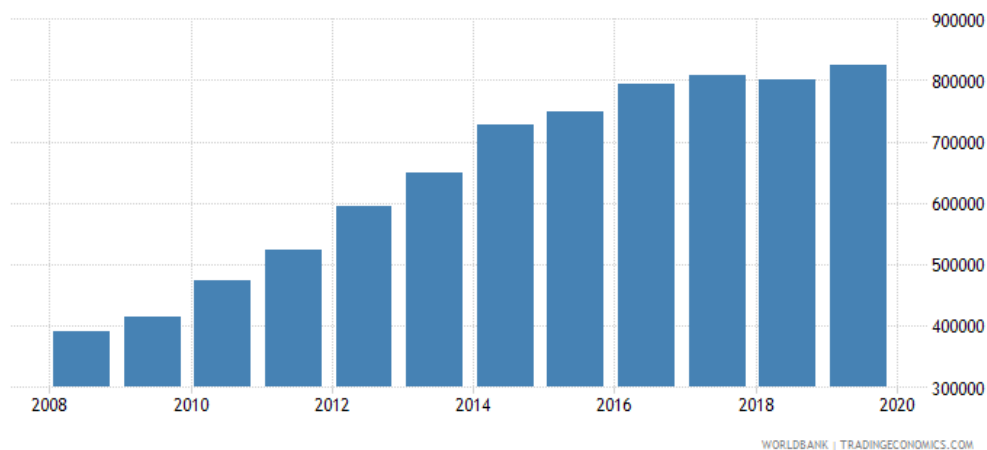
Raja Abdullah juga berupaya meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, khususnya yang terkait dengan pendidikan perempuan. Misalnya, pendidik Noura al-Fayez diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan yang membidangi urusan perempuan pada tahun 2009. Ini merupakan langkah terobosan karena ia menjadi wanita pertama yang mencapai pangkat Wakil Menteri di Arab Saudi. Penunjukannya merupakan langkah ke arah tindakan afirmatif dan diharapkan akan membawa kemajuan besar dalam memajukan pendidikan untuk anak perempuan di Kerajaan. Dia sebelumnya bekerja sebagai direktur bagian wanita di Institut Administrasi Publik di Riyadh di mana dia mengesankan monarki dengan dedikasinya terhadap promosi pendidikan wanita.

Pada bulan September 2011 atau pasca *Arab Spring*, Raja telah mengumumkan bahwa perempuan akan diizinkan untuk memilih, dan untuk mengikuti pemilihan kota yang dijadwalkan pada tahun 2015, dan bahwa mereka juga akan dicalonkan ke Majelis al-Shura. Sejalan dengan komitmen yang terakhir ini, ia menominasikan tiga puluh wanita, termasuk seorang wanita Syiah, ke Majelis al-Syura yang beranggotakan 150 orang pada 16 Januari 2013. Selain itu, lembaga pendidikan baru telah dibuka untuk wanita dan banyak kursus yang sampai sekarang tertutup bagi mereka. , seperti teknik, studi media, ilmu selain

kedokteran dan kursus kejuruan lainnya, telah mengalami peningkatan dalam partisipasi perempuan.

Lebih penting lagi, infrastruktur untuk memberikan pelatihan kejuruan kepada perempuan telah meningkat dalam dekade terakhir. Pada tahun 2004, jumlah lembaga pelatihan kejuruan untuk perempuan telah meningkat menjadi tujuh puluh delapan, dengan pendaftaran lebih dari 5.000 siswa.³³ Sejak tahun 2001, monarki telah mengizinkan investasi swasta dalam pendidikan, dan ini telah menyebabkan pembentukan beberapa lembaga swasta, perguruan tinggi dan universitas untuk pria dan wanita di berbagai bagian Kerajaan.

Grafik 1. Jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Arab Saudi



Sumber: Worldbank – Tradingeconomics.com

Berbicara mengenai pendidikan perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya, Worldbank mencatat data perempuan yang mendaftar di perguruan tinggi mencapai 824.151 orang pada tahun 2019 silam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Mariam Atwia, yakni salah satu mahasiswi perempuan di Arab Saudi mengatakan bahwa perempuan Saudi memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (*tertiary education*) agar dapat memperluas peluang dalam memperoleh karir dan pekerjaan yang diinginkan oleh setiap perempuan di Arab Saudi.

Masing-masing universitas di Arab Saudi menetapkan *passing grade* bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi tersebut. Calon

mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan peminatannya di jurusan manapun, begitupun juga perempuan yang diperkenankan untuk memilih jurusan arsitek, teknik, dan jurusan lain yang sebelumnya tidak diperbolehkan bagi perempuan. Hal ini dituturkan oleh Mariam Atwia bahwa kebijakan akan kebebasan pemilihan minat jurusan bagi perempuan ini sudah berjalan dengan baik dalam satu dekade terakhir. Selain itu, adanya kelonggaran mengenai sistem perwalian laki-laki yang tidak lagi merupakan suatu syarat wajib ketika mendaftar ke perguruan tinggi, menjadi salah satu hal yang memudahkan perempuan untuk dapat mendaftar dan memilih minat jurusan di universitas sesuai dengan keinginannya sendiri.

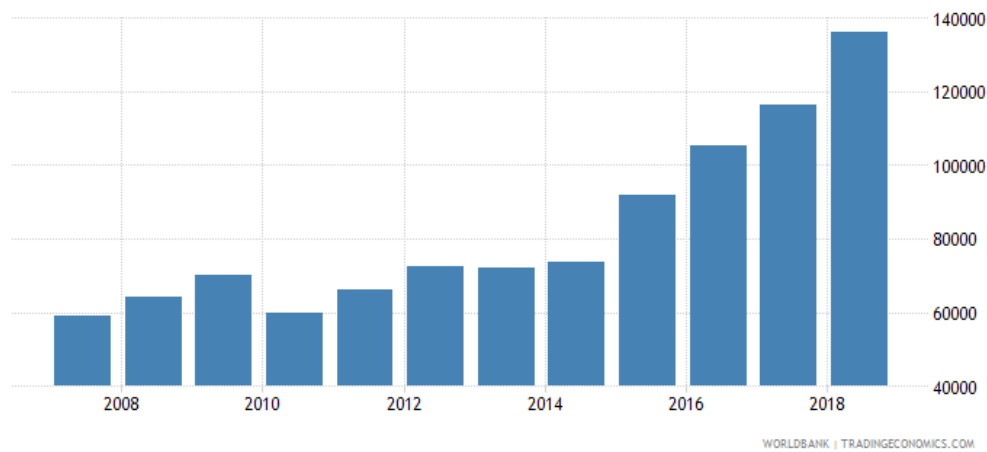
Kebijakan akan kebebasan perempuan dalam menempuh pendidikan perguruan tinggi di berbagai jurusan berkesinambungan dengan jumlah persentase mahasiswi perempuan di Arab Saudi dalam program jurusan Teknik, Manufaktur dan Konstruksi, yakni sebesar 0,61715% pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa perempuan mulai memasuki jurusan yang sebelumnya hanya diperkenankan bagi laki-laki. Selain itu, perempuan yang menjadi lulusan pendidikan tinggi di Arab Saudi dalam berbagai program studi secara menyeluruh pada tahun 2018 mencapai 136.189 orang.

Pada tahun 2005, Program Beasiswa Luar Negeri Raja Abdullah diluncurkan untuk memberikan kesempatan kepada pemuda Saudi, baik pria maupun wanita, untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang pilihan mereka di universitas asing. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, Setelah berhasil menyelesaikan jangka waktu lima tahun pertama pada tahun 2010, program ini diperpanjang untuk lima tahun lagi dan, pada bulan Februari 2013, diumumkan bahwa program tersebut akan diperpanjang untuk jangka waktu ketiga dari 2015.

Program unggulan yang mendukung siswa Saudi dengan memungkinkan mereka pergi ke luar negeri untuk pendidikan tinggi juga telah diperpanjang hingga 2020. Pada Februari 2013, hampir 100.000 siswa Saudi telah mendaftar di bawah program ini untuk pendidikan tinggi di luar negeri, terutama di negara-negara Barat, dan sebanyak 47.000 sejauh ini telah kembali setelah menyelesaikan studi mereka dan sekarang terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pendidikan baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Para perempuan

yang kembali telah membuat perbedaan dalam pendidikan secara keseluruhan dan pendidikan perempuan pada khususnya. Perempuan-perempuan ini, karena kemandirian dan keterpaparan mereka pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tidak diragukan lagi memiliki semacam dampak di antara teman dan keluarga mereka, yang telah menyebabkan peningkatan kesadaran di kalangan perempuan tentang hak-hak mereka, kebebasan dan praktik-praktik gender yang diskriminatif. (Bashraheel, 2013)

Grafik 2. Lulusan perempuan di tingkat perguruan tinggi Arab Saudi



Sumber: Worldbank – Tradingeconomics.com

Meskipun sekolah umum dibagi berdasarkan jenis kelamin, para pemimpin berusaha untuk meningkatkan dan mendiversifikasi sistem pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki. Tahun ajaran mendatang akan membawa peluang baru yang menarik bagi anak perempuan di Arab Saudi terutama kelas pendidikan jasmani. Beberapa warga Arab Saudi menentang akses perempuan ke olahraga, karena dianggap sebagai kegiatan maskulin, tetapi banyak juga yang puas dengan perkembangan tersebut. Hatoon al-Fassi, seorang sejarawan wanita Saudi, mengantisipasi bahwa gerakan tersebut akan membantu anak perempuan untuk membangun otonomi tubuh.

Kemajuan dalam pendidikan anak perempuan di Arab Saudi memang telah memberdayakan perempuan untuk mengejar potensi mereka sendiri. Di luar sekolah menengah, banyak wanita Saudi mendapatkan gelar lanjutan. Data dari

2015 menunjukkan bahwa perempuan menyumbang 51,8% dari siswa di Universitas Saudi. Sekitar 551.000 perempuan terdaftar dalam program sarjana, dengan 24.498 di program pascasarjana dan 1.744 mengejar gelar PhD. Tambahan 35.537 studi di luar negeri di 57 negara. (Borgen Project, 2017)

Partisipasi perempuan dalam perekonomian telah meningkat seiring dengan kontribusi mereka terhadap kehidupan publik, meskipun sebagian besar terbatas pada beberapa pusat kota. Pertumbuhan pendidikan telah menghasilkan lebih banyak perempuan di pasar kerja, meskipun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah perempuan berpendidikan. Pada tahun 2009, hampir 15–18% perempuan dari total tenaga kerja Saudi baik di sektor publik maupun swasta.

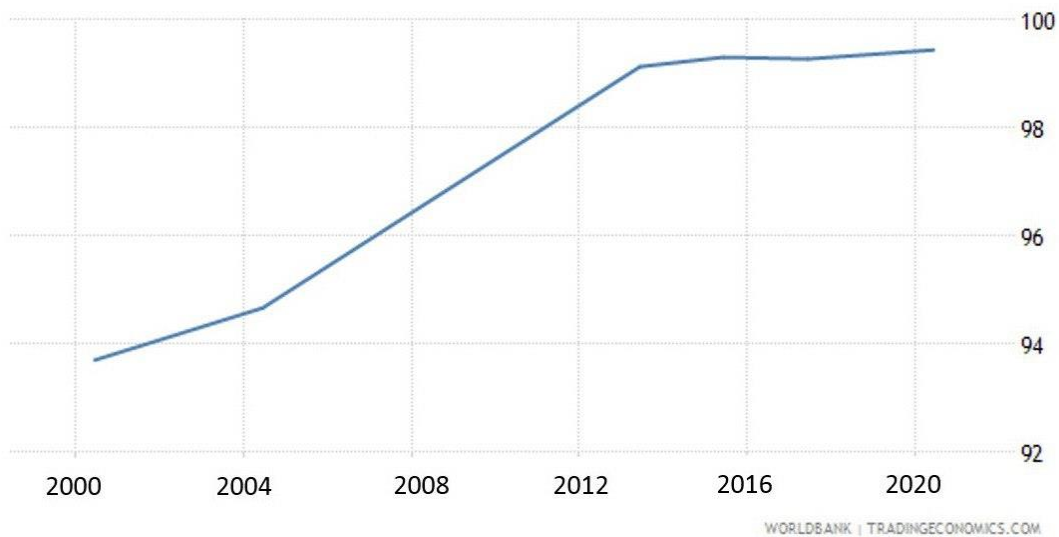
Sebelumnya, lowongan pekerjaan untuk wanita Saudi terbatas, dan terutama di bidang pendidikan dan kedokteran, tetapi perempuan sekarang mengambil pekerjaan di daerah yang lebih baru dan bekerja di berbagai bidang yang tidak pernah tersedia bagi mereka di masa lalu. Perempuan dapat ditemukan bekerja di toko-toko, bandara, mal, hotel dan restoran meskipun sebagian besar bekerja di meja kerja, dan juga dapat ditemukan bekerja di kantor-kantor pemerintah, bank, sekolah dan rumah sakit. (AlMunajjed, 2010)

Pendidikan telah menyebabkan peningkatan jumlah perempuan dalam profesi non-tradisional, seperti jurnalisme, sains dan teknologi, dan teknik serta dalam penelitian. Selain itu, partisipasi perempuan di sektor jasa telah meningkat, sementara mereka juga terjun ke kewirausahaan yang menghasilkan lebih banyak usaha milik perempuan. Kebutuhan akan lokalisasi tenaga kerja Arab Saudi yang dimulai sejak 1990-an menjadi pendorong kebijakan membuka ekonomi bagi perempuan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi perekonomian sekaligus mengurangi ketergantungan negara terhadap tenaga kerja asing.

Amira Kashgari, seorang profesor linguistik di King Abdulaziz University Girls' College, berpendapat bahwa wanita di Arab Saudi telah membuat kemajuan besar “secara intelektual, sosial, ekonomi dan politik” dalam beberapa tahun terakhir. Adanya pertumbuhan tingkat persentase literasi perempuan (rentang umur

15-24 tahun) dilaporkan mencapai 99.45% pada tahun 2020 silam. Hal ini merupakan progress signifikan yang meningkat sejak tahun 2012.

Grafik 3. Persentase tingkat literasi (*literacy rate*) perempuan umur 15-24 tahun di Arab Saudi



Sumber: WorldBank – Tradingeconomics.com

Meningkatnya literasi perempuan di Arab Saudi memiliki dampak yang cukup berarti bagi pembangunan negara. Literasi sangat berkontribusi terhadap produktivitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Percepatan literasi di Arab Saudi menandakan tingginya kualitas lulusan pendidikan di tingkat *primary*, *secondary* maupun *tertiary*. Maka dari itu, angka persentase literasi perempuan dalam pendidikan berbanding lurus dengan keberhasilan pemerintah Arab Saudi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan Arab Saudi.

Pendidikan dan perluasan penggunaan Internet di Arab Saudi memiliki dampak yang nyata pada wanita terutama dalam hal paparan ke dunia luar. Akibatnya, kesadaran sosial dan politik di kalangan perempuan dan penegakan hak-hak mereka meningkat. Sebagian besar wanita Saudi adalah pengguna Internet yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi, meskipun dengan kebijaksanaan, dalam debat dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan isu-isu penting regional dan global. Misalnya, wanita

menyumbang hampir 31% dari semua pengguna Facebook (yang sendiri mewakili 12,24% dari total populasi Kerajaan).

Ketika menyangkut perempuan dan hak-hak mereka, Kerajaan telah mencoba untuk mencapai keseimbangan antara dua tren yang berlawanan di masyarakat. Di satu sisi, telah bekerja untuk meningkatkan kesempatan pendidikan perempuan, yang telah menyebabkan peningkatan jumlah perempuan berpendidikan. Hal ini pada gilirannya menimbulkan tuntutan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih penting lagi, sejumlah besar perempuan berpendidikan siap untuk mengadopsi sikap yang lebih tegas terhadap hak-hak mereka dan menuntut perubahan peran yang secara historis diberikan kepada mereka. Pendidikan perempuan juga menjadi tantangan bagi perekonomian di mana perempuan menuntut kesempatan kerja yang sepadan dengan pendidikan mereka.

Penulis beranggapan bahwa kebijakan reformis Pemerintah Arab Saudi yang berfokus pada peningkatan ketersediaan akses bagi pendidikan perempuan merupakan salah satu dampak baik yang bisa dirasakan oleh perempuan Saudi pada masa kini. Hal tersebut dapat dikatakan mulai menjadi *concern issue* bagi pemerintah Arab Saudi terutama pada periode kepemimpinan Raja Salman.

Isu pendidikan perempuan mulai muncul kepermukaan sejak hadirnya fenomena *Arab Spring* sebagai faktor utama yang melandaskan gerakan untuk menuntut transisi kebijakan yang lebih berpihak terhadap perempuan dan isu sosial lainnya sehingga hal ini mempengaruhi segala aspek kehidupan dan tatanan social budaya di timur tengah terutama pada masa pemerintahan Raja Salman.

Disusul dengan maraknya gerakan sosial perempuan Saudi yakni para aktivis perempuan yang berkampanye di sosial media untuk menyuarakan aspirasi mereka mengenai kebijakan pendidikan perempuan dan mendesak pemerintah Saudi untuk meninjau kembali sistem perwalian laki-laki. Beberapa kampanye yang sukses dilakukan salah satunya adalah *Saudi Anti Male Guardianship Campaign*.

Selain faktor munculnya fenomena *Arab Spring* dan Gerakan perempuan Saudi di media sosial, adanya *Saudi vision 2030* atau visi sudi 2030 juga turut memberikan angin segar bagi ketersediaan akses pendidikan perempuan. Terlihat

dari beberapa gebrakan kebijakan yang membuat perempuan mendapatkan kebebasan untuk menempuh pendidikan di segala tingkat terutama perguruan tinggi, dengan kelonggaran kebijakan berupa kebebasan untuk memilih jurusan peminatan, kesamaan fasilitas-fasilitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki yang tidak lagi dibedakan serta adanya pengaturan ulang mengenai sistem perwalian laki-laki yang tidak menjadi syarat bagi perempuan untuk dapat menempuh pendidikan. Hal ini membawa perubahan yang signifikan dan dapat dibuktikan dengan data fakta dilapangan yang mengatakan bahwa angka persentase perempuan yang menempuh pendidikan formal khususnya di perguruan tinggi meningkat cukup pesat dibanding tahun sebelumnya (dimana fenomena *Arab Spring* masih belum marak di Arab Saudi). Sehingga dapat terlihat bahwa pemerintahan dibawah rezim Raja Salman menganggap pendidikan perempuan merupakan isu serius yang harus mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dari beberapa faktor yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa dampak *Arab Spring* cukup signifikan dalam membawa perubahan arah kebijakan yang reformis terhadap kebijakan mengenai ketersediaan akses perempuan pada periode Raja Salman 2016-2020.